

**ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL PRAJURIT TNI DI
DIREKTORAT TOPOGRAFI TNI ANGKATAN DARAT
JAKARTA**

TESIS



Diajukan Oleh :

SAMSUL HADI
NIM : 161203228

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL PRAJURIT TNI DI
DIREKTORAT TOPOGRAFI TNI ANGKATAN DARAT
JAKARTA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mencapai derajat sarjana S2 / gelar Magister
pada Program Magister Manajemen
STIE WIDYA WIWAHA



Diajukan Oleh :

SAMSUL HADI

NIM : 161203228

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018**

TESIS
ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL PRAJURIT TNI DI
DIREKTORAT TOPOGRAFI TNI ANGKATAN DARAT
JAKARTA

Oleh :

SAMSUL HADI
NIM : 161203228

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Pada tanggal : April 2018

Dosen Penguji

Suhartono, SE, M.Si

Dosen Pembimbing I

Dosen Penguji II/Pembimbing II

Drs. John Suprihanto, MIM., Ph.D

Ir. Muh. Awal Satrio N, MM

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Yogyakarta, April 2018

Mengetahui,

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

DIREKTUR

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.,D

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan Judul :

ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL PRAJURIT TNI DI DIREKTORAT TOPOGRAFI TNI ANGKATAN DARAT JAKARTA

Dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau berasal dari tesis yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan keserjanaan di lingkungan STIE Widya Wiwaha maupun di perguruan Tinggi manapun, kecuali bagian yang bersumber informasi dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2018

SAMSUL HADI
NIM : 161203228

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga telah dapat diselesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada :

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.,D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
2. Ir. Muh Awal Satrio N, MM selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
5. Wakil Direktur dan seluruh prajurit Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat diharapkan

Yogyakarta, April 2018

SAMSUL HADI
NIM : 161203228

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	18
B. Subyek dan Obyek Penelitian	19

	C. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
	D. Metode Pengumpulan Data	20
	E. Keabsahan Data	21
	F. Metode Analisis Data	22
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Lokasi Penelitian	24
	B. Hasil Penelitian	27
	C. Pembahasan	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Personel Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad)	3

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik	22
Gambar 3.2. Analisis Data	23
Gambar 4.1. Logo Direktorat Topografi Angkatan Darat	26
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Direktorat Topografi Angkatan Darat	30
Gambar 4.3. Kegiatan Personel Survei Data Topografi	45
Gambar 4.4. Kegiatan Personel Olah Data Topografi	46

STIE Widya Wiyana
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Peran anggota TNI dengan jabatan fungsional sangat besar dalam memberikan produk informasi geografi/ medan. Setiap personel di Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) dituntut untuk tekun, teliti dan tahan uji sesuai bidang tugasnya sehingga mampu menyelesaikan liputan peta Topografi wilayah darat nasional, memberikan dukungan informasi geografi/ medan yang sesuai dengan kebutuhan satuan jajaran TNI AD dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah rawan konflik dan rawan bencana alam serta untuk kepentingan latihan maupun pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jabatan fungsional Prajurit TNI Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk dapat mengkaji dan mengungkap tentang perlunya jabatan fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Hasilnya jabatan fungsional di Direktorat Topografi Angkatan Darat lebih banyak dilakukan oleh personel yang bertugas di bagian: (1) Subditbinsurdattop yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan survey data serta pembuatan Produk Topografi; (2) Subditbinlahdatatop yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan olah data dan pembuatan laporan wilayah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jabatan fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat adalah alternatif yang pertama memberikan bekal tambahan pendidikan dengan sekolah di perguruan tinggi untuk bidang geodesi dan geografi, kemudian alternatif kedua menambah jumlah prajurit pada Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dan alternatif yang ketiga dapat dipertimbangkan, yaitu merubah cara kerja melalui inovasi agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : *Analisis, Jabatan Fungsional*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semakin pesatnya pembangunan nasional di segala bidang, tantangan bagi dunia Survey Dan Pemetaan (Surta) nasional ke depan akan semakin kompleks dan semakin berat. Sehingga kita semua perlu meneguhkan kembali tekad dan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dan saling pengertian para pemangku kepentingan (*stake holder*) penyedia informasi geografi sehingga diharapkan ada sinergi positif dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan informasi geografi dalam format yang lebih beragam, fleksibel, dinamis dan real time untuk kepentingan pembangunan dan pertahanan keamanan negara.

Selama ini mungkin tidak banyak yang tahu kalau dalam tubuh Angkatan Darat memiliki prajurit-prajurit yang terampil menguasai teknologi survey pemetaan. Menjadi fakta sejarah bahwa sebagian besar wilayah darat nasional kita ternyata telah dipetakan oleh prajurit Topografi. Selama beberapa waktu bahkan muncul persepsi peta-peta yang ada selama ini identik dengan Topografi (baca : Jantop - Jawatan Topografi). Dan sebenarnya sudah lama juga Jantop telah berubah menjadi Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat (Dittopad). Untuk itu mungkin ada baiknya kita mengenal sekilas apa dan siapa Topografi Angkatan Darat. Menurut Letkol Ctp Drs. Ibnu Fatah, M.Sc. yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pembinaan (Kasubditbin) Pemetaan Dittopad, memberikan penjelasan bahwa Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat (Dittopad) adalah

salah satu Badan Pelaksana Pusat Mabesad yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan data dan informasi geografi/ medan guna mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Darat. (Cahyo, 2011)

Mengutip UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang kemudian dijabarkan dalam doktrin KEP, disebutkan tugas-tugas TNI AD mencakup tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah darat, dan melindungi keselamatan bangsa serta menjalankan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tanggung jawab yang dimiliki Dittopad dan jajarannya tidaklah semakin ringan dan mudah.

Topografi TNI AD pada era 1946 sampai dengan 1980an merupakan satu-satunya Lembaga Pemetaan yang membuat peta dasar berupa Topografi kedar 1 : 50.000 secara mandiri. Peta tersebut merupakan rujukan yang banyak digunakan instansi pemerintah maupun militer. Peran ini seiring dengan kebijakan satu peta dan diundangkannya UU Geospasial, cenderung makin berkurang dan saat ini bahkan mendekati titik nadir. Kemunduran peran tersebut tidak terlepas dari faktor internal maupun eksternal. (Cahyo, 2011)

Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat beralamat di jalan Kalibaru Timur V Nomor 47 Jakarta Pusat, menurut surat Edaran Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : SE/02/II/1994 tanggal 14 Pebruari 1994 tentang wewenang dan tanggung jawab Pembuatan, Reproduksi dan Pembekalan Peta Topografi wilayah Nasional Indonesia berada pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan

Darat dalam hal ini Direktorat Topografi. Kemudian Surat Telegram Kasad Nomor : ST/232/1994 tanggal 2 April 1994 tentang wewenang dan tanggung jawab Pembuatan, Reproduksi dan Pembekalan Peta Topografi wilayah Indonesia berada pada Direktorat Topografi. Selanjutnya Kawat Sandi Menteri Dalam Negeri Nomor : X.200/12/SJ tanggal 16 April 1994 menjelaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab Pembuatan, Reproduksi dan Pembekalan Peta Topografi wilayah Nasional Indonesia adalah berada pada Direktorat Topografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data jumlah personel di Direktorat Topografi Angkatan Darat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Personel

Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad)

No	Uraian	Militer														PNS			Jml Bsr	
		B j	K ol	Lt k	M ay	Kp t	Lt n	Pl t	Sr m	Sr k	Sr s	Kp k	Kop	P rk	P ra	Jm l	II I	II		Jm l
1	Pokpimp	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
2	Pok Banmin	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	5	-	1	1	6	
3	Inspektorat	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	5	6	12	
4	Subditbincab	-	1	4	3	4	2	-	-	2	1	-	1	-	18	3	11	14	32	
5	Subditbinsurdatat op	-	1	3	5	6	13	2	-	9	10	-	1	-	8	58	1	4	5	63
6	Subditbinlahdatat op	-	1	5	5	8	14	3	-	7	5	-	1	-	49	1	20	21	70	
7	Subditbinprodmatt op	-	1	3	3	3	3	1	2	1	8	-	1	-	26	3	6	9	35	
8	Subditbinbantop	-	1	3	7	8	3	-	8	1	-	-	1	-	32	3	6	9	41	
9	Sekretariat	-	1	6	7	7	7	3	6	2	8	8	11	4	1	71	1 0	19	29	100
10	Infolahta	-	-	1	2	-	1	-	-	-	7	-	-	-	11	-	2	2	13	
	Jumlah	1	8	2 7	32	38	43	1 0	16	2 2	41	8	19	4	9	27 8	2 2	74	96	374

Sumber : Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), 2017

Data di atas selain menunjukkan jumlah personel di Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), juga menunjukkan bahwa dalam Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) terdapat personel dengan jabatan struktural dan jabatan fungsional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi TNI dijelaskan bahwa Jabatan Struktural, adalah jabatan ini dimulai dari TAMTAMA, BINTARA, dan PERWIRA. Khusus untuk Perwira, Perwira dibagi menjadi 3 bagian yaitu Perwira Pertama (PAMA), Perwira Menengah (PAMEN), dan Perwira Tinggi (PATI). Kemudian untuk Jabatan Fungsional ini merupakan jabatan fungsional tidak tertuliskan secara struktur organisasi, tetapi dari tugas dan fungsi pekerjaannya tidak terlepas dari struktur organisasi, namun jabatan ini sangat diperlukan dalam tugas tugas pokok dalam menjalankan tugas. Ciri dari jabatan ini dalam dunia militer adalah dimulai dari Regu sampai Divisi.

Peran anggota TNI dengan jabatan fungsional sangat besar dalam memberikan produk informasi geografi/ medan. Setiap personel di Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) dituntut untuk tekun, teliti dan tahan uji sesuai bidang tugasnya sehingga mampu menyelesaikan liputan peta Topografi wilayah darat nasional, memberikan dukungan informasi geografi/ medan yang sesuai dengan kebutuhan satuan jajaran TNI AD dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah rawan konflik dan rawan bencana alam serta untuk kepentingan latihan maupun pendidikan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang disampaikan seorang narasumber salah seorang perwira di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat (Dittopad) diketahui bahwa :

1. Terjadi kemunduran peran Topad di panggung nasional karena lemahnya SDM Topografi TNI Angkatan Darat (Topad) merespon dan menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi di bidang Survey Dan Pemetaan (Surta).
2. Orgas Topad disusun hanya mengandalkan struktur jabatan yang sudah ada secara turun temurun tanpa mewadahi dan mengakomodasi pembinaan profesi yang ada dalam jabatan fungsional.
3. Belum semua Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat (Dittopad) memiliki standar kompetensi Jabatan fungsional dalam bidang Topografi.
4. Pengembangan karier prajurit masih terfokus pada Jabatan Struktural yang cenderung terbatas dan Jabatan Fungsional belum dipandang sebagai alternatif pembinaan dan pengembangan karier prajurit.

Permasalahan tersebut diatas seharusnya dapat dikurangi, atau minimal tidak menjadi masalah yang besar dikemudian hari apabila sejak awal manajemen Jabatan Fungsional telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak mudah, tetapi harus dilakukan karena telah diatur dalam peraturan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh Dittopad dan jajarannya. Tidak ada cara lain, Dittopad dan jajarannya harus mampu secara cepat beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan akan informasi geografi/ medan yang lebih akurat, lengkap, *up to date* dan mudah dalam penggunaannya.

Saat ini, paradigma lama yang ada di benak satuan jajaran TNI AD bahwa Topografi AD identik dengan produk Peta Topografi saja (*map oriented*), harus dihapuskan dan digantikan dengan paradigma baru bahwa Topografi AD mampu

memberikan produk informasi geografi/ medan dalam format yang lebih beragam, fleksibel, dinamis dan real time – tidak hanya sekedar lembaran kertas peta dan buku laporan yang cenderung statis. Untuk itu Topografi TNI Angkatan Darat menjalin kerjasama yang erat dengan komunitas Surta nasional dan kalangan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyediaan informasi geografi untuk kepentingan pembangunan dan pertahanan negara. Kerjasama dijalin antara lain dengan ITB, UGM, LAPAN, Bakosurtanal dan institusi-institusi lainnya. Begitu juga dengan pendidikan dan pelatihan di luar negeri juga dijalin, antara lain Inggris, Jepang, Belanda, Amerika Serikat dan Australia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penting untuk dilakukan penelitian tentang “Analisis Jabatan Fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta Tahun 2018.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan adalah jabatan fungsional Prajurit TNI di Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta masih belum optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana jabatan fungsional Prajurit TNIDirektorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jabatan fungsional Prajurit TNI Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Bagi Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap jabatan fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.
3. Bagi STIE Widya Wiwaha, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Flippo (2011 : 10), Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir dimana tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat terpenuhi. Menurut Wayne, dkk (2008 : 5), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, penerimaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan baik individu maupun organisasi.

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah cara mengatur SDM dengan unsur - unsur manajemen ke suatu titik akhir dimana tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat terpenuhi.

2. Analisa Jabatan

Menurut Harsono (2010 : 14) mendefinisikan Analisis jabatan adalah suatu penelaahan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan/jabatan, untuk memperoleh manfaat dari penelaahan tersebut. Sedangkan menurut Mangkunegara (2004 : 13) analisis jabatan adalah prosedur

melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis, hal ini sering disebut dengan studi jabatan, yang mempengaruhi tugas-tugas, proses-proses, tanggung jawab dan kebutuhan kepegawaian yang diselidiki.

Analisis jabatan merupakan faktor penting untuk mendukung penempatan pegawai pada posisi yang tepat dan sesuai dengan latar belakang pendidikan serta kemampuan pegawai dalam mencapai hasil kerja yang maksimal. Menurut Tohardi dalam Mangkunegara (2004 : 14) Terdapat enam alasan penting mengapa analisa jabatan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi :

- a. Organisasi baru dibentuk. Uraian jabatan pada hakikatnya sama pentingnya dengan alasan mengapa organisasi itu dibentuk. Setiap organisasi yang baru muncul atau dibentuk tentu akan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda dengan organisasi lain yang telah terbentuk. Karena organisasi itu baru dibentuk, maka penting sekali untuk menjelaskan atau menguraikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukannya.
- b. Pembentukan suatu pekerjaan baru. Alasan ini mengadu pada munculnya jenis pekerjaan yang baru dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebelumnya.
- c. Pegawai tidak paham terhadap pekerjaannya. Ada sebagian pegawai.
- d. Tumpang tindih dan konflik. Antara pegawai yang satu dengan yang lainnya seringkali melakukan pekerjaan yang sama meskipun mereka

berada dalam bidang berbeda. Kondisi ini dapat mengakibatkan salah paham atau konflik terutama dalam hal pertanggungjawaban atas pekerjaan.

- e. Arus kerja tidak lancar. Dalam arus kerja, pekerjaan yang satu tentu berhubungan dengan pekerjaan yang lainnya. Apabila satu pekerjaan belum memahami kemana pekerjaan itu diteruskan maka kondisi itu dapat mengakibatkan terhentinya proses pada pekerjaan yang lain.
- f. Sistem penggajian tidak konsisten. Uraian jabatan akan memberikan batasan-batasan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Semakin banyak jenis pekerjaan yang dilakukan tentu akan semakin besar kompensasi (gaji) yang diperoleh. Ketidakjelasan terhadap jenis pekerjaan yang dilakukann akan menyebabkan tidak adanya konsistensi dalam hal pemberian imbalan gaji.

2. Jabatan Prajurit TNI

Menurut Utrecht (1994 : 35) Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan atau dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Menurut Wursanto (2009 : 67), Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu perusahaan, dan juga dapat diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak sseorang pegawai dalam susunan suatu organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, jabatan dapat dilihat 2 (dua) yaitu :

- a. Jabatan Struktural, adalah jabatan ini dimulai dari Tamtama, Bintara, dan Perwira. Khusus untuk Perwira, Perwira dibagi menjadi 3 bagian yaitu Perwira Pertama (PAMA), Perwira Menengah (PAMEN), dan Perwira Tinggi (PATI). Jika kita detailkan lagi jabatan Struktural dimulai dengan pangkat PRADA (Prajurit Dua) sampai dengan Jenderal.
- b. Jabatan Fungsional, jabatan fungsional tidak tertulis secara struktur organisasi, tetapi dari tugas dan fungsi pekerjaannya tidak terlepas dari struktur organisasi, namun jabatan ini sangat diperlukan dalam tugas tugas pokok dalam menjalankan tugas. Ciri dari jabatan ini dalam dunia militer adalah dimulai dari Regu sampai Divisi.

3. Jabatan Fungsional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
- b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- c. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan :
 - 1) Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian;
 - 2) Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan.
- d. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
- e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional. (PP Nomor 40 Tahun 2010)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, menyatakan ketentuan mengenai jabatan fungsional TNI sebagai berikut :

- a. Jabatan di luar struktur TNI pada instansi sipil yang dapat diduduki oleh Prajurit aktif adalah jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Pertahanan Negara,

Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta instansi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi Prajurit yang bertugas di luar struktur TNI, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Panglima
- c. Prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dimaksud
- d. Prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dimaksud.
- e. Pembinaan karier Prajurit yang menduduki jabatan diselenggarakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan

4. Korps Topografi

Korps Topografi adalah salah satu korps milik TNI-AD yang secara profesional menangani persoalan survei dan pemetaan (*survey and mapping*). Korps inilah yang memberikan informasi terkait kondisi topografi wilayah,

beserta Ipoleksosbudhan yang diperlukan oleh TNI-AD dalam menyusun berbagai strategi dan taktis untuk mendukung semua operasinya. (www.kodam17cenderawasih.mil.id)

Topografi TNI Angkatan Darat memiliki tugas yang menitikberatkan pada kegiatan penyediaan informasi geografi, contohnya seperti peta Topografi dalam rangka mendukung tugas-tugas Angkatan Darat, baik itu operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Korps inilah yang memetakan semua sumber daya alam, batas wilayah antar Negara dengan Negara tetangganya. Korps Topografi adalah “mata ujung tombak” yang menjelma menjadi pertahanan NKRI, sesuai kepentingan TNI AD.

Korp Topografi memiliki tugas pokok menyelenggarakan penyediaan dan penyajian informasi Geografi/Medan Wilayah Indonesia dalam bentuk Pembaharuan (Revisi) Peta Topografi, data dan analisa medan, serta pembuatan Produk Topografi lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi survei dan pemetaan yang berkembang dengan pesat serta kebutuhan satuan-satuan di TNI/TNI AD akan produk Topografi saat ini dan ke depan yang tidak lagi hanya berbentuk peta Topografi standar, tetapi sudah mengarah kepada kegiatan analisa medan yang memerlukan data dan proses yang cukup kompleks, maka jelas terlihat kalau tantangan tugas ke depan tadi tidaklah ringan.

Teknologi survey pemetaan berbasis digital telah membawa perubahan besar terhadap kinerja Insan Topografi. Berbagai produk Topografi dapat

disajikan dengan berbagai format digital sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan nilai positif. Untuk itu prajurit Topografi TNI Angkatan Darat dimanapun berada dan bertugas harus menguasai perkembangan teknologi survey pemetaan sehingga kita dapat berkreasi dan berinovasi untuk terus menegakan fungsi dan eksistensi Topografi.

B. Penelitian Terdahulu

Perdhana, 2014, penelitian dengan judul “Penguatan Jabatan Fungsional Untuk Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan jabatan fungsional untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil penelitian menyatakan bahawa untuk meningkatkan kapasitas kinerja organisasi dan mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat, tidak cukup dengan upaya biasa-biasa saja dan melakukan upaya yang sama dengan yang saat ini telah dilakukan. Zaman akan berubah dan terus berubah, cara-cara yang saat ini dilakukan dalam manajemen SDM Aparatur akan segera ketinggalan sehingga suka tidak suka birokrasi harus berubah, manajemen SDM Aparatur harus berubah dan SDM Aparatur juga harus berubah. Tidak cukup hanya dengan wacana dan perbaikan validitas tampang organisasi agar ‘seolah-olah’ organisasi telah melakukan reformasi, tetapi perlu inovasi baru dan perbaikan menyeluruh melalui tindakan nyata dari seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi organisasi sampai pada pegawai

level terendah. Semua pegawai dengan jabatannya masing-masing harus dapat menjadi seorang yang profesional, pegawai yang cerdas, berpengetahuan dan kompeten yang bekerja tulus sepenuh hati, berdedikasi mengabdikan diri untuk memajukan negeri, dan mampu berperan maksimal dalam meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kolaborasi kinerja antar Pejabat harus mampu menciptakan budaya kemitraan dan kerjasama yang kondusif dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Penugasan dan pekerjaan kepada setiap Pejabat diberikan dengan kompeten, sesuai dengan potensi, kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing pejabat.

Gozali, 2015, penelitian dengan judul “Studi Tentang Analisis Jabatan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mempresentasikan Studi Tentang Analisis Jabatan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui fokus penelitian Persyaratan Jabatan dilihat dari aspek: Tingkat pendidikan, Pengalaman kerja, dan Pangkat/Golongan kemudian Uraian jabatan dapat dilihat dari aspek: Kesesuaian antara kapasitas pegawai dengan beban kerja, Keterampilan dan keahlian dengan jenis pekerjaan, dan Kesesuaian kompetensi pegawai dengan kualitas pekerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Jabatan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari aspek kesesuaian antara tingkat pendidikan dengan bidang tugasnya tidak semuanya sesuai kualifikasi yang diharapkan, baik ditinjau dari latar belakang pendidikan maupun

tingkat pendidikan masih terdapat ketidaksesuaian. Sedangkan pada aspek pengalaman kerja dalam pengangkatan jabatan maupun dalam penempatan kerja aparatur lebih mempertimbangkan aspek pengalaman kerja. Secara aplikatif pengangkatan dalam jabatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, didasarkan pertimbangan rasionalitas terutama dari aspek kepangkatan. Sementara pada uraian jabatan menunjukkan bahwa memang secara kumulatif kapasitas pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sudah tersusun cukup baik. Penerapan persyaratan jabatan yang didukung dengan keterampilan dan keahlian sudah berjalan sebagaimana mestinya. Penempatan pegawai ditinjau dari aspek keterampilan dan keahlian pegawai dengan bidang pekerjaan semua pegawai sesuai dan dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan keterampilan dan keahlian sehingga upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat optimal. Dengan demikian secara representatif menunjukkan indikasi cukup baik. Hasil pengumpulan data dari 51 unit kerja tersebut menunjukkan bahwa penempatan pegawai dilihat dari aspek kompetensi pegawai dengan beban kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai kompetensi yang bersangkutan sudah cukup baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk dapat mengkaji dan mengungkap tentang perlunya jabatan fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, (2007: 287) adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dipandang sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif. Dengan demikian penelitian kualitatif mencoba mengungkap masalah yang belum jelas bagi peneliti dan hasil peneliti dapat berbeda dengan hipotesis kerja. Metode ini digunakan dengan harapan agar dapat melakukan proses penelitian dan mengungkap masalah dengan menyesuaikan pada keadaan dan kondisi real serta mengungkap fakta menurut keadaan atau situasi social yang sedang berlangsung sehingga seluruh aktifitas yang terjadi dapat diamati dan dijelaskan.

Menurut Bungin (2010 : 68) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas social yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu atau

gejala sosial yang tengah berlangsung pada saat studi.

Penelitian deskriptif disini dimaksudkan untuk dapat menemukan fakta dengan interpretasi yang menggambarkan sifat dari fenomena- fenomena yang berasal dari kelompok ataupun dari individu yang berasal dari temuan dilapangan. Penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan pada umumnya holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, selain itu peneliti juga bermaksud memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis-tulisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh) (Moleong, 2000 : 5).

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri atas 1 orang Wadir Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, 1 orang Kasubditsurdatatop dan 1 orang kasubditlahdatatop di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Dalam penelitian ini subyek penelitian sejumlah 3 orang. Objek penelitian berkaitan dengan perlunya jabatan fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat dan dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tidak melalui perantara. Dalam penelitian ini dipergunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang kemudian diolah. Data ini bersumber dari variabel-variabel yang berkaitan dengan jabatan fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Arikunto (2006 : 158), Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan mengenai perlunya jabatan fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden yang dilakukan oleh peneliti responden sejumlah 3 orang yang menyatakan kesanggupannya untuk diwawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158), Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Pada Penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Profil Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.

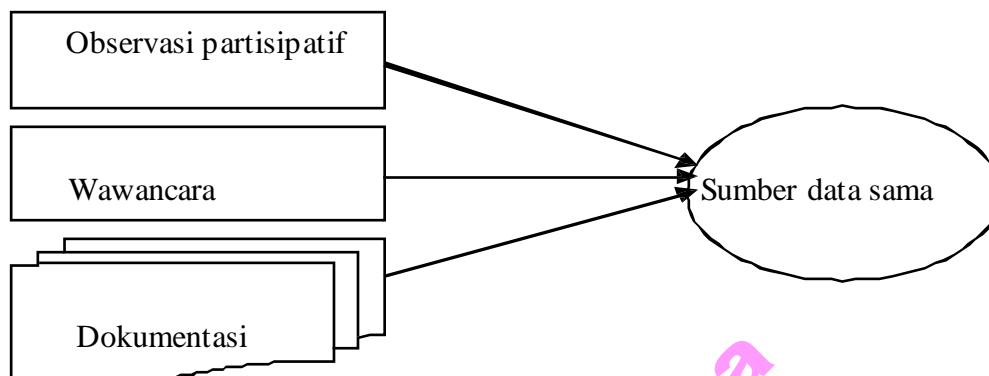
E. Keabsahan Data

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini menggunakan jenis triangulasi triangulasi teknik.

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiono, 2007).

Gambar 3.1

Triangulasi Teknik



Sumber : Sugiyono, 2007

F. Metode Analisis Data

Analisis perlunya jabatan fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta berdasarkan hasil wawancara, observasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif komparasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu menggambarkan tentang perlunya jabatan fungsional Prajurit TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta. Pada umumnya analisis kualitatif terhadap data dapat dilakukan dengan tahap-tahap: menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi (mengaitkan gejala secara sistematis dan logis), membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Model analisis kualitatif yang terkenal adalah model Miles & Hubberman (2007:424) yang meliputi :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah memilah data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna.

2. Sajian deskriptif

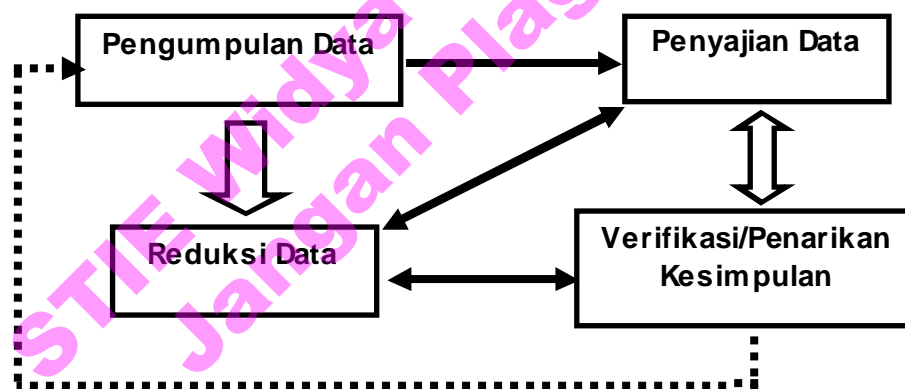
Sajian deskriptif berupa narasi, visual gambar, tabel, dengan sajian yang sistematis dan logis serta analisis data penelitian ini

3. Penyimpulan dari hasil yg disajikan.

Model analisis diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2.

Analisis Data



Sumber : Miles & Hubberman (2007 : 424)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Korps Topografi adalah salah satu korps milik TNI-AD yang secara profesional menangani persoalan survei dan pemetaan (*survey and mapping*). Korps inilah yang memberikan informasi terkait kondisi topografi wilayah, beserta Ipoeksosbudhan yang diperlukan oleh TNI-AD dalam menyusun berbagai strategi dan taktis untuk mendukung semua operasinya.

Topografi Angkatan Darat memiliki tugas yang menitikberatkan pada kegiatan penyediaan informasi geografi, contohnya seperti peta Topografi dalam rangka mendukung tugas-tugas Angkatan Darat, baik itu operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Korps inilah yang memetakan semua sumber daya alam, batas wilayah antar Negara dengan Negara tetangganya. Korps Topografi adalah “mata ujung tombak” yang menjelma menjadi pertahanan NKRI, sesuai kepentingan TNI AD.

Korp Topografi memiliki tugas pokok menyelenggarakan penyediaan dan penyajian informasi Geografi/Medan Wilayah Indonesia dalam bentuk Pembaharuan (Revisi) Peta Topografi, data dan analisa medan, serta pembuatan Produk Topografi lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Angkatan Darat.

Visi dan Misi Direktorat Topografi Angkatan Darat

Visi :

Mewujudkan Topografi Angkatan Darat yang mampu menyediakan / menyajikan informasi medan / geografi wilayah darat nasional secara cepat, tepat, akurat dan mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Angkatan Darat.

Misi :

1. Mengembangkan teknologi untuk pemetaan dalam rangka proses penyelesaian liputan peta serta pembaharuan / revisi peta topografi wilayah darat nasional.
2. Mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan data geografi / medan wilayah darat nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan penyajian informasi geografi / medan .
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang survei dan pemetaan.
4. Mengembangkan alat peralatan dihadapkan dengan teknologi di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan rencana geomatika.
5. Memberikan bantuan teknis topografi kepada Satuan jajaran Angkatan Darat.

Makna Lambang :

Pusara LIKHITA BHUTALA YUDDHA KARYA Berarti mencatat/ menggambarkan permukaan bumi (peta) untuk keperluan perang (pertahanan) dan pembangunan nasional untuk menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Gambar 4.1.

Logo Direktorat Topografi Angkatan Darat



Sumber : Dittopad, 2018

Tiang Pusara terbuat dari kayu bulat panjang dengan garis tengah 4 cm dan panjang 2,5 cm. Pada leher tiang tertulis Surya Sengkala Karana (Alat) Riya (Membuat) Sarvada (terus-menerus) Prativi (Bumi). Yang berarti **TOPAD** adalah “Suatu alat yang secara terus menerus membuat gambar permukaan bumi.”

1. Alat ukur Theodolit

Merupakan alat ukur untuk mengukur sudut jarak, ketinggian dan penentuan posisi dengan mengukur bintang dalam rangka pelaksanaan pembuatan peta. Gambar Theodolit tersebut dalam keadaan siap ukur yang diartikan bahwa TOPAD siap sedia untuk melaksanakan tugasnya dalam setiap saat.

2. Bola Dunia

Diartikan bahwa tugas TOPAD dalam membuat peta dan mengumpulkan data medan dari seluruh permukaan bumi terutama wilayah negara RI. Bola

dunia digambar dengan 5 garis lintang yang mengandung arti 5 pasal dari Sumpah Prajurit serta 7 garis bujur yang berarti tujuh pasal Sapta Marga.

3. Kertas

Menggambarkan bahwa hasil pengukuran dibuat dengan menggunakan proyeksi tertentu digambarkan pada lembar kertas.

4. Untaian padi dan kapas

Merupakan suatu lambang kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Untaian padi terdiri dari 26 butir, untaian kapas 4 buah, ditambah 6 helai daun padi dan 6 helai daun kapas merupakan rangkaian angka 26-4-1946 yang merupakan hari lahir Topografi TNI Angkatan Darat.

5. Bintang bersudut lima

Diartikan bahwa tiap tindakan anggota TOPAD adalah berdasarkan ketulusan hati, kesucian jiwa dan menganggungkan Tuhan Yang Maha Esa.

Warna Hijau Tua : Lambang Kepercayaan

Biru Muda : Lambang Kehalusan

Putih : Lambang Kesucian dan Kebersihan hati

Kuning Emas : Lambang Keluhuran, Kejayaan.

B. Hasil Penelitian

1. Organisasi Dan Tugas Direktorat Topografi Angkatan Darat (Orgas Dittopad)

Direktorat Topografi Angkatan Darat disingkat Dittopad adalah Badan Pelaksana Pusat ditingkat MABESAD yang berkedudukan langsung dibawah

Kasad. Dittopad bertugas membina dan menyelenggarakan penyediaan dan penyajian Informasi Geografi / Medan dalam bentuk Peta Topografi, data dan analisa medan serta produk Topografi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Angkatan Darat.

a. Fungsi Dittopad

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dittopad menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Utama

a) Pembinaan Kecabangan.

Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengolahan kebijaksanaan organisasi, personel, pembinaan Satuan, pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan, doktrin, peraturan dan petunjuk serta pembinaan tradisi korps untuk mewujudkan kemampuan Satuan Topografi Angkatan Darat.

b) Pemetaan.

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pembuatan Peta Topografi standar kedar 1 : 50.000 dan 1 : 100.000 serta peta kedar 1 : 250.000 dan kedar lebih kecil.

c) Geografi.

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pembuatan Laporan Wilayah serta Informasi Geografi Topografi Angkatan Darat.

d) Pembuatan Produk Topografi lainnya.

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan pembuatan Peta Tematik, Foto Udara, Mozaik Foto Udara, Peta Foto, Gazetter, Analisa Medan, Model Medan, Evaluasi Perkiraan Cuaca, Tabel Deklinasi Matahari, Tabel Deklinasi Magnet, Protraktor dan lain-lain.

e) Pembinaan Materiil Topografi.

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, pengendalian inventori, penyimpanan, pemeliharaan dan pembekalan materiil Topografi.

2) Fungsi Organik Militer.

Meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dibidang pengamanan, latihan, pengorganisasian, personel, logistik, perencanaan, pengendalian program, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan serta tata usaha urusan dalam, dalam rangka mendukung tugas Dittopad.

b. Susunan Organisasi

Organisasi Dittopad disusun sebagai berikut :

1) Eselon Pimpinan.

- a) Direktur Topografi Angkatan Darat, disingkat Dirtopad.
- b) Wakil Direktur Topografi Angkatan Darat, disingkat Wadirtopad.

2) Eselon Pembantu Pimpinan.

- a) Inspektorat Dittopad, disingkat Ir Dittopad.
- b) Sub Direktorat Pembinaan Kecabangan, disingkat Subditbincab.

c) Sub Direktorat Pembinaan Survei Data Topografi, disingkat Subditbinsurdatatop.

d) Sub Direktorat Pembinaan Olah Data Topografi, disingkat Subditbinlahdatatop.

e) Sub Direktorat Pembinaan Materiil Topografi, disingkat Subditbinmattop.

3) Eselon Pelayanan.

a) Sekretariat Dittopad, disingkat Setdittopad.

b) Informasi dan pengolahan data, disingkat Infolahta.

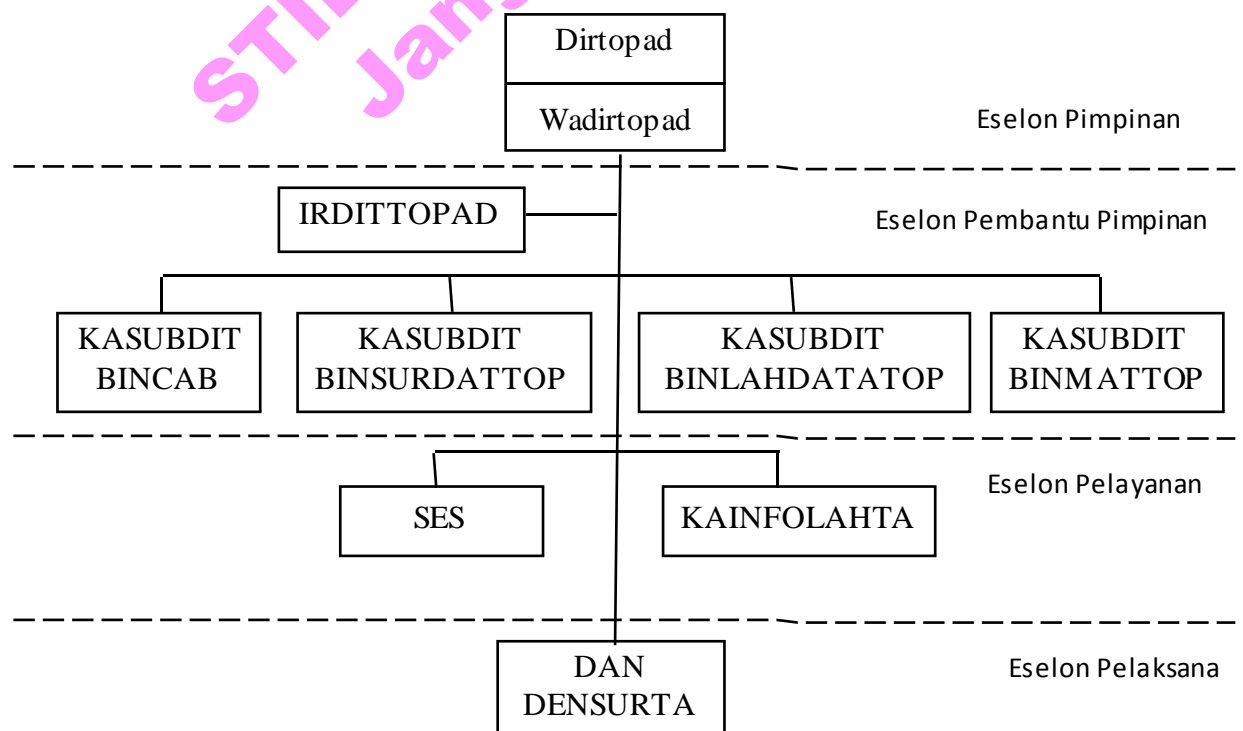
4) Eselon Pelaksana.

Detasemen Survei dan Pemetaan, disingkat Densurta.

Atau dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2.

Struktur Organisasi Direktorat Topografi Angkatan Darat



d. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab

1) Dirtopad

a) Dirtopad dijabat oleh Pati Angkatan Darat berpangkat Brigadir Jenderal TNI dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1. Sebagai Pimpinan Dittopad.

- a. Mengendalikan Dittopad, sehingga semua usaha, pekerjaan dan kegiatan tidak menyimpang dari tugasnya.
- b. Memimpin perencanaan dalam membuat usulan program/anggaran dan pelaksanaan program/anggaran Dittopad.
- c. Memelihara tata tertib, disiplin dan penegakan hukum dilingkungan Dittopad.
- d. Menjamin daya guna, hasil guna dan keserasian kerja dilingkungan Dittopad.
- e. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan kemampuan kerja dan pengembangan personel.
- f. Memelihara dan meningkatkan kelancaran, perawatan personel, materiil serta penyelenggaraan administrasi logistik.

2. Sebagai Perwira Staf Khusus Kasad.

- a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Kasad, tentang hal-hal yang berkaitan dalam bidangnya.
- b. Menyelenggarakan pengawasan sesuai bidangnya terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsi Topografi di Satuan jajarannya.

3) Sebagai Pembina Kecabangan.

- a. Melaksanakan perencanaan serta pengendalian pembinaan fungsi utama secara berhasil dan berdaya guna dilingkungan Dittopad.
- b. Mengadakan penilaian, penelitian dan penganalisaan terhadap personel yang bertugas dilingkungan Dittopad dalam rangka pendayagunaan secara efektif dan efisien, sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal.
- c. Menyelenggarakan pembinaan, penelitian, pengendalian dan pengawasan dibidang pembinaan kecabangan sesuai dengan ketentuan pimpinan Angkatan Darat yang meliputi pembinaan organisasi, sistem dan prosedur, sejarah dan tradisi Korps Kecabangan Topografi.
- d. Memberikan asistensi teknis kepada Satuan, Badan, Lembaga di lingkungan Angkatan Darat yang berhubungan dengan pengurusan produk Topografi.

4) Sebagai Ordonatur Pembantu/Bendawisesa.

- a. Mengusahakan agar persediaan peta dan materiil Topografi dalam gudang persediaan mencukupi kebutuhan.
- b. Melaksanakan segala usaha pembekalan dengan jalan pembuatan, pembetulan, pengajuan permintaan dan pembelian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Membentuk komisi dalam rangka untuk memeriksa / menguji materiil yang diterima maupun yang akan dibekalkan ke satuan pemakai.
- d. Memberi petunjuk-petunjuk kepada komisi mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
- e. Memberi petunjuk-petunjuk kepada Bendaharawan Materiil mengenai tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Mengesahkan berita acara yang dibuat oleh komisi.
- g. Memeriksa inventaris materiil yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b) Dirtopad dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasad, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

2) Wadirtopad

- a. Wadirtopad dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Ctp, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Memimpin, mengatur mengkoordinasikan dan mengawasi segala kegiatan dari eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana dilingkungan Dittopad.
 - 2) Merumuskan, menjabarkan dan memberikan petunjuk/pengarahan dari setiap kebijaksanaan Dirtopad kepada eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana.

- 3) Mengawasi pelaksanaan tugas dan mengadakan penilaian secara periodik mengenai tingkat kemampuan untuk dijadikan bahan pembinaan personel.
 - 4) Mengkoordinasikan pembuatan laporan dari eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana sebagai bahan laporan kepada Kasad.
 - 5) Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dirtopad mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
 - 6) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dirtopad.
 - 7) Mengusahakan terjalin dan terpeliharanya koordinasi antara eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana.
 - 8) Mewakili Dirtopad apabila Dirtopad berhalangan, sejauh diluar tanggung jawab kebendaharaan.
- b. Wadirtopad dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad.

3) Irdittopad

- a. Irdittopad dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Ctp, merupakan pembantu Dirtopad yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan Irdittopad. .

- 2) Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan dibidang umum dan perbendaharaan di lingkungan Dittopad.
 - 3) Membantu kelancaran pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan dari luar Dittopad.
 - 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dirtopad sesuai bidang tugasnya.
- b. Irdittopad dalam melaksanakan tugas dibantu oleh dua Inspektur Madya yang masing-masing dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Ctp dan satu Kepala Kelompok Administrasi yang dijabat oleh PNS Gol. III, terdiri dari :
- 1) Inspektur Madya Pengawasan Pemeriksaan Umum, disingkat Irdyawasrikum
 - 2) Inspektur Madya Pengawasan dan Pemeriksaan Perbendaharaan, disingkat Irdyawasrikben.
 - 3) Kepala Kelompok Administrasi, disingkat Kapokmin.
- c. Irdittopad dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad, dalam melaksanakan tugas sehari hari dikoordinasikan oleh Wadirtopad.

4) Subditbincab

- a. Kasubditbincab dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Ctp, merupakan pembantu Dirtopad yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan kecabangan Topografi, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di lingkungan Subditbincab.
 - 2) Merumuskan program kerja dibidang pembinaan kecabangan Topografi.
 - 3) Menyelenggarakan/melaksanakan pembinaan personel, organisasi, pengendalian kekuatan dan kesiapan Satuan kecabangan Topografi.
 - 4) Merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan dibidang pendidikan dan latihan kecabangan Topografi.
 - 5) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang organisasi, personel, sistem dan metode serta pengkajian materiil dalam rangka penyelenggaraan fungsi Topografi.
 - 6) Merumuskan dan menyusun doktrin, peraturan, petunjuk teknis kecabangan Topografi.
 - 7) Menghimpun dan memelihara data sejarah Topografi yang bersifat perorangan maupun satuan, sebagai landasan pembinaan tradisi Korps Topografi.
 - 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dirtopad sesuai bidang tugasnya.
- b. Kasubditbincab dalam melaksanakan tugas dibantu oleh empat Kepala Bagian yang masing-masing dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Ctp dan satu Kepala Kelompok Administrasi yang dijabat oleh Pns Gol III, terdiri dari :
- 1) Kepala Bagian Pembinaan Satuan, disingkat Kabagbinsat.

- 2) Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan, disingkat Kabagdiklat.
 - 3) Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, disingkat Kabaglitbang.
 - 4) Kepala Bagian Doktrin Peraturan/Petunjuk dan Tradisi Korps, disingkat Kabag dokturjuktrakorps.
 - 5) Kepala Kelompok Administrasi, disingkat Kapokmin.
- c. Kasubditbincab dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadirtopad.

5) Subditbinsurdattop

- a. Kasubditbinsurdattop dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Ctp, merupakan pembantu Dirtopad yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan survey data serta pembuatan Produk Topografi lainnya yang berkaitan dengan bidang Pemetaan, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dilingkungan Subditbinsurdattop.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kerja yang berkaitan dengan pemetaan dan pembuatan Produk Topografi lainnya.
 - 3) Menyelenggarakan/melaksanakan pembinaan teknis Geodesi.

- 4) Menyelenggarakan/melaksanakan pembinaan teknis Fotogrametri termasuk Citra Radar dan Satelit.
 - 5) Menyelenggarakan/melaksanakan pembinaan teknis Kartografi.
 - 6) Menyelenggarakan/melaksanakan pembinaan teknis Reproduksi dan Percetakan.
 - 7) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan teknis pemetaan dilingkungan Dittopad dan Topdam.
 - 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dirtopad sesuai bidang tugasnya
- b. Kasubdit Binsurdattop dalam melaksanakan tugas dibantu oleh lima Kepala Bagian yang masing-masing dijabat oleh Pamen TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Ctp dan satu Kepala Kelompok Administrasi yang dijabat oleh PNS Gol. III, terdiri dari :
- 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengendalian, disingkat Kabagrendal.
 - 2) Kepala Bagian Geodesi, disingkat Kabaggesi.
 - 3) Kepala Bagian Fotogrametri, disingkat Kabagfotri.
 - 4) Kepala Bagian Kartografi, disingkat Kabagkarfi.
 - 5) Kepala Bagian Reproduksi dan Percetakan, disingkat Kabagreptak.
 - 6) Kepala Kelompok Administrasi, disingkat Kapokmin.
- c. Kasubdit Binsurdattop dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadirtopad.

6) Subditbinlahdatatop

- a. Kasubditbinlahdatatop dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Ctp merupakan pembantu Dirtopad yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan olah Data dan pembuatan Laporan Wilayah, Sistem Informasi Geografi serta pembuatan Produk Topografi lainnya yang berkaitan dengan bidang Geografi, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Memimpin, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengawasi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dilingkungan Subditbinlahdatatop.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kerja yang berkaitan dengan Geografi dan pembuatan Produk Topografi lainnya.
 - 3) Menyelenggarakan/ melaksanakan pembinaan teknis pembuatan Laporan Wilayah.
 - 4) Menyelenggarakan/ melaksanakan pembinaan teknis Sistem Informasi Geografi.
 - 5) Menyelenggarakan/ melaksanakan bimbingan teknis Geografi dilingkungan Dittopad dan Topdam.
 - 6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dirtopad sesuai bidang tugasnya
- b. Kasubditbinlahdatatop dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tiga Kepala Bagian yang masing-masing dijabat oleh Pamen Angkatan

Darat berpangkat Letnan Kolonel Ctp dan dibantu satu Kepala Kelompok Administrasi yang dijabat oleh PNS Gol. III, terdiri dari :

- 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengendalian, disingkat Kabagrendal.
 - 2) Kepala Bagian Pembuatan Laporan Wilayah disingkat Kabaglapwil.
 - 3) Kepala Bagian Sistem Informasi Geografi, disingkat Kabag SIG.
 - 4) Kepala Kelompok Administrasi, disingkat Kapokmin.
- c. Kasubditbingefi dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadirtopad.

7) Subditbinmattop

- a. Kasubditbinmattop dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Ctp, merupakan pembantu Dirtopad yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan Materiil Topografi, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dilingkungan Subditbinmattop.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kerja yang berkaitan dengan Materiil Topografi.
 - 3) Menyelenggarakan/ melaksanakan pembinaan inventori, katalogisasi dan penghapusan Materiil Topografi.

- 4) Menyelenggarakan/melaksanakan pemeliharaan alat Topografi.
 - 5) Menyelenggarakan/melaksanakan penggudangan Bahan, Alat Topografi serta Peta dan Produk Topografi lainnya.
 - 6) Menyelenggarakan pembinaan administrasi materiil Topografi.
 - 7) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan teknis pembinaan Materiil Topografi dilingkungan Dittopad dan Topdam
 - 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dittopad sesuai bidang tugasnya.
- b. Kasubditbinmattop dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tiga Kepala Bagian dan satu Kepala Gudang yang masing-masing dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Ctp serta satu Kepala Kelompok Administrasi yang dijabat oleh PNS Gol. III, terdiri dari :
- 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengendalian, disingkat Kabagrendal.
 - 2) Kepala Bagian Inventarisasi, Katalogisasi dan Penghapusan Materiil Topografi, disingkat Kabaginventmattop.
 - 3) Kepala Bagian Pemeliharaan Alat Topografi, disingkat Kabagharaltop.
 - 4) Kepala Gudang Peta dan Materiil Topografi, disingkat Kagudtamattop.
 - 5) Kepala Kelompok Administrasi, disingkat Kapokmin.

- c. Kasubditbinmattop dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadirtopad.

8) Sekretariat

- a. Sesdittopad dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Ctp, merupakan unsur pelayanan Dittopad yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi organik, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi segala usaha, pekerjaan kegiatan Setdittopad.
 - 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Madittopad.
 - 3) Menyelenggarakan dan melaksanakan pengamanan.
 - 4) Menyelenggarakan pengurusan administrasi personel.
 - 5) Menyelenggarakan / melaksanakan pengurusan logistik.
 - 6) Menyelenggarakan / melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program
 - 7) Menyelenggarakan / melaksanakan urusan dalam Madittopad.
 - 8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dirtopad sesuai bidang tugasnya.
- b. Sesdittopad dalam melaksanakan tugas dibantu oleh enam Kepala Bagian yang masing-masing dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Ctp terdiri dari :
 - 1) Kepala Bagian Pengamanan, disingkat Kabagpam.

- 2) Kepala Bagian Personel, disingkat Kabagpers.
 - 3) Kepala Bagian Logistik, disingkat Kabaglog.
 - 4) Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, disingkat Kabagrenproggar
 - 5) Kepala Bagian Urusan Dalam, disingkat Kabagurdal.
 - 6) Kepala Bagian Tata Usaha, disingkat Kabag TU.
- c. Sesdittopad dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadirtopad.

9) Infolahta

- a. Kainfolahta dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Ctp, merupakan unsur pelayanan Dirtopad yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan Informasi dan Pengolahan Data elektronik, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di lingkungan Infolahta.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang berkenaan dengan sistem informasi dan pengolahan data di lingkungan Dittopad.
 - 3) Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data secara terus menerus meliputi data survei dan pemetaan, personel, materiil, pangkalan dan peranti lunak.
 - 4) Memelihara peranti keras dan lunak secara terbatas.

- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dirtopad sesuai bidang tugasnya.
- b. Kainfolaha dalam melaksanakan tugas dibantu oleh dua Kepala Seksi yang masing-masing dijabat oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Ctp, terdiri dari :
- 1) Kepala Seksi Operasi Pengolahan Data, disingkat Kasiopslahta.
 - 2) Kepala Seksi Sistem Informasi, disingkat Kasisisfo.
- c. Kainfolaha dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadirtopad.

10) Densurta

- a. Densurta adalah Eselon Pelaksana Dittopad yang bertugas melaksanakan kegiatan lapangan dalam rangka survei pemetaan untuk mendukung tugas Dittopad.
- b. Densurta dipimpin oleh Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Ctp sebagai Dandensurta yang dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dirtopad, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadirtopad.

2. Penguatan Manajemen, Peran Dan Kompetensi Jabatan Fungsional Dittopad

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 3.1. jabatan fungsional di Direktorat Topografi Angkatan Darat lebih banyak dilakukan oleh personel yang bertugas di bagian :

1) Subditbinsurdattop

Personel yang bertugas di bagian Subditbinsurdattop bertanggung jawab dalam pelaksanaan survey data serta pembuatan Produk Topografi yang berkaitan dengan bidang Pemetaan, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kerja yang berkaitan dengan pemetaan dan pembuatan Produk Topografi lainnya, melaksanakan pembinaan teknis Geodesi, melaksanakan pembinaan teknis Fotogrametris termasuk Citra Radar dan Satelit, melaksanakan pembinaan teknis Kartografi, melaksanakan pembinaan teknis Reproduksi dan Percetakan.

Gambar 4.3.

Kegiatan Personel Survei Data Topografi



Sumber : Data Primer, 2018

2) Subditbinlahdatatop

Personel yang bertugas dibagian subditbinlahdatatop bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan olah data dan pembuatan laporan wilayah, sistem informasi geografi serta pembuatan Produk Topografi lainnya yang berkaitan dengan bidang geografi, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kerja yang berkaitan dengan Geografi dan pembuatan Produk Topografi lainnya, melaksanakan pembinaan teknis pembuatan Laporan Wilayah, melaksanakan pembinaan teknis Sistem Informasi Geografi, melaksanakan bimbingan teknis Geografi dilingkungan Dittopad dan Topdam.

Gambar 4.4.

Kegiatan Personel Olah Data Topografi



Sumber : Data Primer, 2018

Kompetensi jabatan fungsional di subdit survei data dan subdit olah data merupakan hal yang penting bagi Direktorat Topografi Angkatan Darat, namun kenyataannya posisi jabatan ini dipegang oleh personel dengan pendidikan struktural yang dididik di Sekolah Sesko, Diklapa dan kecabangan lain, seperti yang disampaikan narasumber berikut ini :

Wadir Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, menyampaikan :

“Kompetensi jabatan fungsional di subdit survei data dan subdit olah data meruakam hal yang penting bagi Direktorat Topografi Angkatan Darat, namun kenyataannya posisi jabatan ini dipegang oleh personel dengan pendidikan struktural yang dididik di Sekolah Sesko, Diklapa dan kecabangan lain”

Kasubditsurdatatop:

“Standar kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan oleh Jabatan fungsional belum memenuhi di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta seharusnya kedepannya ada pendidikan khusus bagi personel jabatan fungsional ini.”

Kasubditlahdatatop:

“jabatan fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta belum didukung dengan pendidikan khusus geografi untuk lahdata dan geodesi untuk surdata sehingga perlu mendapat perhatian bagi peningkatan kompetensinya dengan pendidikan di perguruan tinggi dalam bidang geodesi dan geografi.”

Pernyataan diatas menyampaikan bahwa kompetensi jabatan fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta belum didukung dengan pendidikan khusus geografi untuk lahdata dan geodesi untuk surdata sehingga perlu mendapat perhatian bagi peningkatan kompetensinya dengan pendidikan di perguruan tinggi dalam bidang geodesi dan geografi, sehingga Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat perlu melakukan penguatan manajemen, peran dan kompetensi Jabatan Fungsional dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta artinya membuat perubahan dalam Instansi tersebut. Perubahan dalam suatu organisasi akan mengancam pekerjaan, status, dan kesempatan dari sebagian anggota organisasi, khususnya personel yang telah bekerja di bagian surdata dan lahdata. Hal lainnya yang membutuhkan usaha

lebih organisasi dalam melakukan perubahan adalah pada saat harus menghentikan kebiasaan organisasi demi sebuah perubahan, dengan pembinaan jabatan fungsional secara khusus.

Penguatan manajemen, peran dan kompetensi Jabatan Fungsional melalui kegiatan revitalisasi Jabatan Fungsional mengandung beberapa implikasi perubahan bagi organisasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Rasionalisasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (*right sizing*).
- b. Manajemen karier, pola karier dan rencana karier personel TNI.
- c. Program diklat yang terstruktur berdasarkan kebutuhan pembinaan karier personel TNI dan pengembangan profesionalisme setiap jabatan yang didukung oleh lembaga penyelenggaraan diklat yang *establish*.
- d. Harga jabatan dan harga kinerja jabatan.
- e. Penerapan prinsip '*the right person on the right place and the right time*'.
- f. Penyelarasan pengelolaan kinerja personel TNI dan penilaian prestasi kerja personel TNI.
- g. Penghargaan kepada personel TNI, baik penghargaan yang bersifat finansial maupun non finansial, dan
- h. Sistem, budaya kemitraan dan kerjasama antara Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional berdasarkan kode etik yang berlaku.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk penguatan manajemen, peran dan kompetensi Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta Yang Mendukung Pembinaan Dan Penguatan Peran Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Target yang ingin dicapai melalui penataan kompetensi jabatan fungsional personel TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta adalah menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan struktural di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Istilah organisasi ' *miskin struktur kaya fungsi* ' sering dikemukakan dalam penataan organisasi pada Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta pasca pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dengan struktur yang kecil tetapi memiliki fungsi yang besar, seperti disampaikan narasumber berikut ini:

Wadir Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, menyampaikan :

“Pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, bagian tugas pemetaan sekarang menjadi survei data dan bagian tugas geografi sekarang menjadi olah data topografi, harapannya peran jabatan fungsional menjadi lebih baik lagi”

Kasubditbinsurdatatop:

“Standar kompetensi Jabatan fungsional bermanfaat dalam melakukan pengembangan kompetensi prajurit dalam bidang survei data. Bagi prajurit di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta yang belum memenuhi syarat kompetensi, pengembangan kompetensi prajurit dilakukan mengacu kepada standar kompetensi jabatan di surdata perlu diperhatikan apalagi yang berhubungan dengan geodesi dan kartografi.”

Kasubditbinlahdatatop:

“Pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi di subditbinlahdatatop sudah dilaksanakan oleh Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sehingga harapannya mampu mendukung penguatan dan peningkatan peran Jabatan Fungsional di lahdata yang menguasai ilmu geografi.”

Berdasarkan narasumber diatas sebagai pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan ilmu topografi terutama bidang ilmu geodesi dan geografi serta perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Salah satu tantangan dalam penataan organisasi Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta adalah bagaimana organisasi mampu mendukung penguatan dan peningkatan peran Jabatan Fungsional sehingga Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta yang kaya fungsi benar-benar terwujud. Jabatan Fungsional yang dibentuk mengacu kepada fungsi organisasi harus menjadi representasi dari organisasi yang kaya fungsi melalui pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional terutama dibagian survei data dan olah data. Untuk dapat menjadi representasi dari organisasi yang kaya fungsi, tentunya peran dan kompetensi Pejabat Fungsional dalam organisasi harus dikuatkan dan

ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan melakukan penataan dan penguatan organisasi dengan mewajibkan Pejabat Fungsional untuk berperan lebih banyak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sistem dan struktur yang dibangun dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus dapat membagi pekerjaan secara proporsional kepada Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Pejabat Struktural fokus pada pekerjaan manajerial dan Pejabat Fungsional fokus pada pelaksanaan pekerjaan teknis sesuai dengan spesialisasi pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya. Sistem, tata laksana dan tata hubungan kerja organisasi harus diatur sedemikian rupa agar budaya kemitraan dan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dapat berjalan efektif sehingga kinerja organisasi dapat meningkat.

Pembagian pekerjaan antara Pejabat Struktural dan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus tertuang dalam Keputusan yang mengatur tentang organisasi dan tata laksana untuk menghindari permasalahan baru dikemudian hari yang disebabkan karena kecemburuan antar Pejabat. Selain itu, Pejabat Fungsional juga memiliki payung hukum dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Mekanisme pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi dapat disusun melalui sistem yang memungkinkan budaya kemitraan dan kerjasama antar Pejabat dan menghasilkan 'role' yang dapat disepakati bersama. Agar Pejabat Fungsional

dapat berperan lebih banyak sesuai dengan spesialisasi pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya, sedapat mungkin sistem dan tata laksana organisasi disusun dengan memfasilitasi Pejabat Fungsional dapat berhubungan lintas fungsi dan lintas struktur secara fleksibel. Hal tersebut juga bertujuan agar informasi dan pengetahuan dalam organisasi dapat dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan tugas-tugas dalam organisasi.

Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sebagai *knowledge worker* dengan pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya hanya dapat produktif jika pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki Pejabat Fungsional diintegrasikan kedalam suatu tugas dan pekerjaan sehingga semua potensi yang dimiliki organisasi dapat berkontribusi maksimal bagi organisasi. Hal tersebut menjadi alasan lain pentingnya membangun organisasi yang dapat mengakomodir anggotanya untuk menampilkan pekerjaan terbaik sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Faktor kuncinya adalah bagaimana pimpinan dalam organisasi mampu menata ulang atau meredesain 'box' struktur organisasi, meredefinisi peran masing-masing fungsi dalam kotak organisasi seiring dengan perubahan visi, misi, strategi dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.

Meredesain struktur organisasi Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta membutuhkan kemampuan yang sangat berbeda dibandingkan dengan mengisi kotak organisasi. Meredesain organisasi membutuhkan kemampuan dan sertifikasi dari pengalaman langsung pemimpin organisasi, serta

ketajaman untuk dapat mengerti peran, tugas dan tanggung jawab serta peranan masing-masing anggota organisasi dalam konteks kelompok. Semakin fokus dan terspesialisasi fungsi organisasi, maka pelaksanaan pekerjaan akan semakin efektif dan kapasitas untuk melaksanakan tugas organisasi akan semakin besar. Tidak mudah, tetapi harus dilakukan apabila cita-cita memiliki organisasi yang 'miskin struktur kaya fungsi' sebagaimana tuntutan Reformasi Birokrasi dapat diwujudkan.

b. Penetapan dan penerapan standar kompetensi Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta secara konsisten

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia telah menyatakan bahwa setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat jabatan berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan TNI. Jabatan tersebut terdiri atas jabatan struktural dan jabatan fungsional

Kompetensi dalam TNI di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Agar Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dapat memberikan kontribusi maksimal dalam kinerja organisasi, maka Pejabat Fungsional tersebut harus

kompeten sesuai dengan spesialisasi dan keilmuannya untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan standar kompetensi Jabatan Fungsional di sebagai acuan dalam melakukan penilaian kompetensi terhadap Pejabat Fungsional. Penilaian kompetensi Jabatan bertujuan untuk mengetahui apakah Pejabat tersebut kompeten atau tidak untuk dapat melaksanakan pekerjaan Jabatannya. Pemenuhan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi adalah syarat minimal yang harus dimiliki seorang prajurit sebelum diangkat dalam suatu Jabatan Fungsional atau untuk dapat naik jenjang dalam Jabatan Fungsional.

Selain sebagai acuan dalam melakukan penilaian kompetensi, standar kompetensi Jabatan juga bermanfaat dalam melakukan pengembangan kompetensi prajurit. Bagi prajurit di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta yang belum memenuhi syarat kompetensi, pengembangan kompetensi prajurit dilakukan mengacu kepada standar kompetensi jabatan dengan harapan kompetensi prajurit meningkat dan dapat memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh Jabatan di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta. Bagi prajurit yang telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan telah menduduki Jabatan, pengembangan kompetensi dilakukan untuk mendukung pengembangan karier prajurit, terutama apabila dilakukan mutasi pada Jabatan lain yang setara atau dipromosikan untuk naik pada jenjang Jabatan yang lebih tinggi.

Berbeda dengan Jabatan Struktural yang semakin tinggi jenjang jabatan struktural membutuhkan kompetensi manajerial yang semakin tinggi, pada Jabatan Fungsional, semakin tinggi jenjang jabatan maka membutuhkan kompetensi teknis yang semakin tinggi, seperti yang disampaikan narasumber berikut ini :

Wadir Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, menyampaikan :

“standar kompetensi Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta secara konsisten dilakukan karena berbeda dengan Jabatan Struktural yang semakin tinggi jenjang jabatan struktural membutuhkan kompetensi manajerial yang semakin tinggi, pada Jabatan Fungsional, semakin tinggi jenjang jabatan maka membutuhkan kompetensi teknis yang semakin tinggi.”

Kasubditbinsurdatatop:

“standar kompetensi Jabatan juga bermanfaat dalam melakukan pengembangan kompetensi prajurit. Bagi prajurit subditbinsurdatatop yang belum memenuhi syarat kompetensi geodesi, pengembangan kompetensi prajurit dilakukan mengacu kepada standar kompetensi jabatan dengan harapan kompetensi prajurit meningkat dan dapat memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh Jabatan di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dan akhirnya bisa menjadi perwira analis ahli pemetaan dan perwira ahli geografi.”

Kasubditlahdatatop:

“pengembangan kompetensi prajurit di subditlahdata dilakukan mengacu kepada standar kompetensi geografi dengan harapan kompetensi prajurit meningkat dan dapat memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh Jabatan di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta.”

Hal tersebut disebabkan Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dibentuk dengan kriteria mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas

disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu. Setiap Jabatan Fungsional membutuhkan pengetahuan, kompetensi dan keilmuan yang terspesialisasi sesuai dengan fungsinya dalam bidang topografi.

Sifat pekerjaan Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar untuk jenjang Jabatan Fungsional keahlian pertama sampai pada tingkat pakar untuk jenjang Jabatan Fungsional keahlian Utama. Untuk Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta keterampilan, pekerjaan dilaksanakan dengan kompetensi yang bersifat dasar untuk Jabatan Fungsional keterampilan Pemula sampai pada kompetensi yang bersifat koordinatif untuk Jabatan Fungsional keterampilan Penyelia. Semakin tinggi jenjang Jabatan Fungsional, maka akan semakin spesifik dan terspesialisasi pengetahuan, kompetensi, keilmuan dan keahlian/keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang Pejabat Fungsional.

Untuk mewujudkan Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta yang memiliki pengetahuan, kompetensi dan keahlian/keterampilan yang terspesialisasi dalam bidang topografi, bersifat profesional sesuai dengan kepakaran dan keilmuannya, harus didukung beban pekerjaan yang sesuai dan relevan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional. Hal tersebut diperlukan agar kompetensi yang dimiliki Pejabat Fungsional dapat terjaga dan semakin meningkat, saling terkait antara jenjang yang dibawah dengan jenjang di atasnya.

Penerapan standar kompetensi secara konsisten, didukung dengan komitmen dari pimpinan organisasi dan pihak-pihak terkait diperlukan untuk mewujudkan Pejabat Fungsional yang berpengetahuan, kompeten dan menguasai keilmuan sesuai dengan spesialisasi dan kepakarannya. Sifat permisif, yaitu bersifat terbuka atau serba membolehkan atau mengizinkan dengan argumen 'kebijaksanaan atas dasar kemanusiaan' dalam manajemen kepersonel TNI an dan penerapan standar kompetensi jabatan harus dihilangkan. Hanya prajurit yang telah memenuhi standar kompetensi yang berhak untuk diangkat dalam Jabatan dan hanya Pejabat yang memenuhi standar kompetensi yang berhak untuk naik jenjang Jabatan. Jika belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, maka pengembangan kompetensi yang harus dilakukan, atau melakukan evaluasi ulang dengan menata kembali penempatan dan pengangkatan personel TNI dalam jabatan dengan memperhatikan potensi, kompetensi dan kinerja prajurit. Melakukan penataan kembali personel TNI terkait dengan penempatan dan pengangkatan dalam jabatan juga dalam rangka memperbaiki manajemen karier dan kaderisasi organisasi untuk mengurangi permasalahan dikemudian hari akibat kesalahan dalam menempatkan prajurit atau kesalahan dalam mengangkat prajurit dalam Jabatan.

2. Mengembalikan peran dan tanggung jawab Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sesuai dengan tujuan dibentuknya Jabatan Fungsional

Seorang Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus memenuhi syarat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk dapat menduduki Jabatan Fungsional tertentu, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi keahlian/keterampilan. Untuk dapat menduduki Jabatan Fungsional atau naik jenjang Jabatan, seorang prajurit harus mengikuti dan lulus Diklat untuk menduduki Jabatan atau Diklat penjurangan Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Fungsional bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya secara mandiri, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu oleh Pejabat Fungsional yang lainnya. Meskipun demikian, tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan tetap melekat pada Pejabat Fungsional tersebut. Belum semua manajemen Jabatan Fungsional dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pada Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, masih terdapat permasalahan terkait dengan Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, antara lain:

- a. Belum semua Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta menetapkan dan memiliki diklat Jabatan dan jenjangnya sebagai syarat personel TNI untuk dapat

diangkat dalam Jabatan atau naik jenjang Jabatan yaitu dalam bidang topografi khususnya keahlian geodesi dan geografi dengan pendidikan khusus. Bagi yang telah memiliki diklat Jabatan, tidak jarang dalam pelaksanaan Diklat hanya sekedar formalitas untuk mengguurkan kewajiban agar dapat diangkat dalam Jabatan atau naik jenjang Jabatan, tetapi kualitas lulusan diklatnya tidak sesuai dengan standar pengetahuan, kompetensi dan keilmuan yang dipersyaratkan. Selain itu, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta belum melaksanakan evaluasi pasca diklat sehingga kesesuaian antara kebutuhan dan tujuan dilaksanakan diklat dengan hasil diklat serta *return of training investment* dari diklat tersebut tidak terukur, akibatnya efektifitas dan efisiensi diklat tidak pernah diketahui.

- b. Belum semua Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta memiliki standar kompetensi Jabatan fungsional bidang topografi. Beberapa Jabatan Fungsional yang telah memiliki standar kompetensi, belum diterapkan secara konsisten. Hal tersebut berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya sertifikasi kompetensi jabatan dan program pengembangan kompetensi Pejabat tidak terarah. Dampaknya adalah profesionalisme Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesialisasi pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya dalam bidang topografi masih belum optimal.

- c. Struktur organisasi dan tata laksana, prosedur kerja, tata hubungan kerja, serta budaya kerja di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta belum memfasilitasi Pejabat Fungsionalnya untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Tidak jarang pekerjaan dalam organisasi dibagi habis kepada Pejabat Strukturalnya sesuai dengan struktur organisasi, Pejabat Fungsional tidak memiliki kewenangan tanggung jawab terhadap pekerjaan dalam organisasi, walaupun itu adalah pekerjaan teknis. Seringkali juga Jabatan Fungsional hanya diberikan porsi yang kecil atau sebagian kecil dari pekerjaan dalam organisasi. Hal tersebut berakibat pada tidak berkembangnya Jabatan Fungsional dalam organisasi, mulai dari kompetensi, tanggung jawab pekerjaan sampai pada loyalitas prajurit kepada organisasi
- d. Pengangkatan prajurit dalam Jabatan Fungsional seringkali hanya dijadikan syarat untuk menggurkan kewajiban bahwa sesuai dengan Peraturan, semua Personel TNI harus diangkat dalam Jabatan. Karena kotak Jabatan Struktural dalam organisasi terbatas, maka personel TNI diangkat dalam Jabatan Fungsional. Pengangkatan prajurit dalam Jabatan tidak dimaknai sebagai sebuah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sebagian pekerjaan organisasi kepada prajurit. Hal tersebut terkadang tidak disadari oleh organisasi dan prajurit yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, akibatnya pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional dilaksanakan hanya untuk memenuhi angka kredit jabatan dan mengharapkan imbalan. Dalam Pelaksanaan pekerjaan tidak terdapat

pemaknaan lebih dalam bahwa terdapat tanggung jawab moral, etika dan kualitas hasil kerja yang harus diimbangi dari setiap pekerjaan yang dilakukan dan imbalan yang diterima.

Narasumber menyampaikan :

Wadir Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, menyampaikan :

“Seorang Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus memenuhi syarat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk dapat menduduki Jabatan Fungsional tertentu, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi keahlian/keterampilan. Untuk dapat menduduki Jabatan Fungsional atau naik jenjang Jabatan, seorang prajurit harus mengikuti dan lulus Diklat.”

Kasubditbinsurdatatop:

“Belum semua manajemen Jabatan Fungsional dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pada Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, masih terdapat permasalahan terkait dengan Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sehingga perlu ada Pengangkatan prajurit dalam Jabatan sebagai sebuah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sebagian pekerjaan organisasi kepada prajurit.”

Kasubditbinlahdatatop:

“perbaikan ini sebaiknya ada pembenahan struktur organisasi dan tata laksana, prosedur kerja, tata hubungan kerja, serta budaya kerja di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta belum memfasilitasi Pejabat Fungsionalnya untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dan kompetensinya”

Berdasarkan narasumber permasalahan tersebut di atas seharusnya dapat dikurangi, atau minimal tidak menjadi masalah yang besar dikemudian hari apabila sejak awal manajemen Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Tidak mudah, tetapi harus dilakukan karena telah diatur dalam peraturan, dimana sebaiknya personil yang diberi tugas dalam jabatan fungsional survei data dan olah data mendapatkan pendidikan khusus di perguruan tinggi dengan bidang geodesi dan geografi.

4. Penugasan Pejabat Fungsional

Layaknya sebuah Profesi, dibutuhkan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Sebagai seorang yang profesional, seorang Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dituntut untuk dapat fokus terhadap hasil pekerjaan dengan tidak mengabaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus dapat mengungkapkannya perannya dalam konteks kinerja organisasi, menciptakan mekanisme kerjanya sendiri sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi, harus belajar untuk mengukur hasil kerjanya dalam konteks organisasi serta harus dapat bertransformasi dan adaptif saat menghadapi perubahan dalam organisasi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu instrumen penting membentuk profesionalisme di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta adalah pembentukan Jabatan Fungsional, hal ini juga disampaikan oleh narasumber sebagai berikut :

Wadir Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, menyampaikan :

“Layaknya sebuah Profesi, dibutuhkan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Sebagai seorang yang profesional, seorang Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi

TNI Angkatan Darat Jakarta dituntut untuk dapat fokus terhadap hasil pekerjaan dengan tidak mengabaikan proses pelaksanaan pekerjaan..”

Kasubditbinsurdatatop:

“Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus dapat mengungkapkan perannya dalam konteks kinerja organisasi, menciptakan mekanisme kerjanya sendiri sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi, harus belajar untuk mengukur hasil kinerjanya dalam konteks organisasi serta harus dapat bertransformasi dan adaptif saat menghadapi perubahan dalam organisasi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Kasubditbinlahdatatop:

“berperan sebagai seorang yang profesional, dibutuhkan lingkungan pekerjaan yang mendukung Pejabat Fungsional untuk dapat bertumbuh sebagai seorang profesional sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya.”

Narasumber menyampaikan untuk dapat berperan sebagai seorang yang profesional, dibutuhkan lingkungan pekerjaan yang mendukung Pejabat Fungsional untuk dapat bertumbuh sebagai seorang profesional sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya. Setelah organisasi ditata agar menjadi lebih ramah terhadap Pejabat Fungsional, standar kompetensi Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta ditetapkan dan diterapkan secara konsisten dan Pejabat Fungsional berperan sesuai dengan ‘yang seharusnya, hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa Pejabat Fungsional hanya mendapatkan penugasan yang kompeten dari Pejabat yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan. Penugasan yang kompeten adalah penugasan yang diberikan kepada prajurit sesuai dengan potensi dan kompetensi prajurit dengan instruksi dan arahan yang jelas, serta

mempertimbangkan pengalaman dan kinerja personel TNI sebelumnya. Selain itu penugasan yang kompeten juga dapat diartikan bahwa penugasan diberikan sesuai dengan jenjang jabatan Pejabat Fungsionalnya, sehingga potensi, kompetensi dan kinerja Pejabat Fungsional dapat terjaga dan berkembang sesuai dengan jenjang jabatannya.

Belum ada standar khusus untuk jenis penugasan yang kompeten yang berlaku umum. Standar penugasan yang kompeten berada pada Pejabat yang memberi penugasan dan prajurit yang menerima penugasan. Bagi personel TNI tertentu, penugasan dengan instruksi 'untuk ditindaklanjuti' sudah cukup jelas dan kompeten, tetapi bagi sebagian prajurit mungkin perlu ditambah dengan instruksi dan arahan yang jelas melalui penambahan langkah-langkah yang harus dilakukan, referensi yang harus dibaca dan batasan pelaksanaan pekerjaan dalam bidang survei data dan olah data topografi. Disamping kompleksitas setiap penugasan yang diberikan, perbedaan kompetensi setiap prajurit berpengaruh terhadap penerimaan dan pelaksanaan penugasan atau pekerjaan oleh prajurit. Hal tersebut seharusnya membuat setiap Pejabat yang memberikan penugasan memperhatikan instruksi dari setiap penugasan yang diberikan kepada prajurit.

Karena sifat jabatan yang terspesialisasi sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya, penugasan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional tentunya juga harus spesifik sesuai dengan spesialisasinya. Pengetahuan dan kompetensi yang terspesialisasi hanya dapat produktif jika diintegrasikan dalam tugas pekerjaan dalam organisasi. Bagaimana sebuah

organisasi didesain dan dapat mendesaian sistem kerja sedemikian rupa agar pengetahuan, kompetensi dan keilmuan yang dipersyaratkan dalam Jabatan Fungsional dapat diintegrasikan dengan tugas dan fungsi organisasi sangat menentukan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa Pejabat Fungsional hanya mendapatkan penugasan yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kegagalan seorang Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas pekerjaannya juga merupakan kegagalan Pejabat yang memberikan penugasan dan Pejabat yang mengangkat personel TNI tersebut dalam Jabatan Fungsional. Tidak adil jika kegagalan tersebut hanya dibebankan oleh Pejabat Fungsional saja mengingat terdapat faktor lain diluar Pejabat Fungsional yang berpengaruh dalam keberhasilan melaksanakan pekerjaan.

Untuk dapat melakukan penguatan manajemen, peran dan peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional dalam mendukung kinerja organisasi, peningkatan kinerja Pejabat Fungsional menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Tiga faktor yang mempengaruhi kinerja personel TNI tersebut harus diperhatikan dan dicermati secara mendalam. Ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Faktor kemampuan/kompetensi sangat dipengaruhi keberhasilan dalam melakukan perencanaan, rekrutmen dan pengembangan kompetensi personel TNI yang dilakukan organisasi. Faktor tingkat usaha sangat dipengaruhi oleh budaya kerja yang dibangun dalam organisasi dan motivasi yang diberikan oleh atasan serta lingkungan kerjanya dalam meningkatkan *self motivation* personel TNI. Faktor yang terakhir sangat

dipengaruhi oleh pimpinan organisasi dan atasan personel TNI, termasuk salah satunya adalah penugasan yang diberikan kepada personel TNI. Penugasan yang terukur dengan instruksi dan arahan yang jelas sesuai dengan potensi, kompetensi, dan jenjang jabatan personel TNI merupakan dukungan yang berarti bagi personel TNI untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dukungan lainnya dapat berupa pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi dengan pendidikan khusus selain yang selama ini sudah dilaksanakan di Diklapa, Sesko namun juga diberikan bekal tambahan pendidikan dengan sekolah di perguruan tinggi untuk bidang geodesi dan geografi, serta dukungan dalam bentuk penilaian kinerja prajurit yang obyektif.

5. Perbaikan Manajemen Jabatan Fungsional

Tuntutan terhadap peran dan tanggung jawab pekerjaan Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta terus meningkat, beban kerja semakin bertambah, dan besarnya harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas prajurit Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta seharusnya dapat menjadi momentum untuk merubah manajemen Jabatan Fungsional. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah Pejabat Fungsional agar beban pekerjaan yang bertambah dapat diselesaikan atau merubah cara kerja melalui inovasi agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien sehingga beban pekerjaan dapat diselesaikan walaupun jumlah Pejabat Fungsional tetap, dan solusi lain yang

diharapkan adalah dengan memberikan bekal tambahan pendidikan dengan sekolah di perguruan tinggi untuk bidang geodesi dan geografi, seperti yang disampaikan narasumber berikut ini:

Wadir Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, menyampaikan :

“perbaikannya saya rasa dengan memberikan bekal tambahan pendidikan dengan sekolah di perguruan tinggi untuk bidang geodesi dan geografi, penambahan personel dan merubah cara kerja melalui inovasi agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien. Konsekuensinya adalah perlu penguatan dan peningkatan peran setiap anggota organisasi, salah satunya adalah Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta melalui peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi dari Pejabat Fungsional untuk menghasilkan dan mendukung kegiatan inovasi..”

Kasubditbinsurdatatop:

“sebaiknya diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan dengan sekolah di perguruan tinggi untuk bidang geodesi selain perlu menambah jumlah prajurit pada Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dan mempuat suatu cara kereja yang lebih baik.”

Kasubditbinlahdatatop:

“sebaiknya ada semacam peltihan atau pendidikan tambahan di bidang geografi sehingga dapat meningkatkan kompetensi kami dalam bidang olah data topografi sehingga arahnya nanti kami bisa menjadi analis olah data topografi.”

Alternatif yang pertama memberikan bekal tambahan pendidikan dengan sekolah di perguruan tinggi untuk bidang geodesi dan geografi, kemudian alternatif kedua menambah jumlah prajurit pada Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta tidak mudah karena harus mendapat persetujuan dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik

Indonesia, dan berpotensi untuk menambah beban anggaran Negara dengan cukup besar.

Pilihan alternatif yang ketiga dapat dipertimbangkan, yaitu merubah cara kerja melalui inovasi agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien. Konsekuensinya adalah perlu penguatan dan peningkatan peran setiap anggota organisasi, salah satunya adalah Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta melalui peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi dari Pejabat Fungsional untuk menghasilkan dan mendukung kegiatan inovasi.

Fokus manajemen Jabatan Fungsional Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta perlu diubah, tidak lagi terkait dengan administrasi keprajuritan, tetapi bergeser dengan fokus pada potensi, kompetensi, dan apa yang dapat diberikan Pejabat Fungsional terhadap organisasi terutama dalam bidang Topografi. Cara pandang terhadap manajemen keprajuritan diubah, bahwa Pejabat Fungsional tidak hanya dipandang sebagai prajurit saja, tetapi sebagai aset berharga organisasi yang merupakan faktor utama penentu baik buruknya Dittopad. Prajurit yang sebelumnya hanya dianggap sebagai *tangible aset* yang dinilai berdasarkan berapa jumlah Prajurit, kualifikasi pendidikan yang dimiliki setiap prajurit dan sudah berapa diklat yang diikuti oleh personel TNI, harus diubah cara pandang dan fokusnya bahwa Personel TNI harus dikembangkan sebagai *intangibile aset* yang memiliki kualitas yang tinggi, unik, penuh dengan dedikasi dan loyalitas, mampu mengaktualisasikan bakat dan kemampuannya, serta dapat bekerja dengan

penuh semangat dengan etos kerja yang tinggi. Manajemen Jabatan Fungsional harus mampu mengoptimalkan potensi, pengetahuan, kompetensi dan kemampuan Pejabat Fungsional sesuai spesialisasinya masing-masing untuk menghasilkan pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab serta dengan kompetensi dan kemampuannya dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru untuk mendukung pelaksanaan pekerjaannya.

Manajemen karier Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus diubah cara pandang dan sudut pandangnya dengan tujuan agar pengetahuan, kompetensi dan keilmuan Pejabat Fungsional dapat terus berkembang sesuai dengan potensi dan spesialisasinya, serta berperan optimal dalam berkontribusi terhadap kinerja organisasi yang harapannya nantinya bisa menjadi perwira analis ahli pemetaan dan perwira analis ahli geografi. Sebagai kelompok *knowledge worker* dengan pengetahuan, kompetensi dan keilmuan yang terspesialisasi, seorang Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus memahami bahwa Pejabat Fungsional dikenal karena spesialisasi dan keakarannya dalam suatu bidang atau fungsi pekerjaan tertentu yaitu geodesi dan geografi. Konsekuensinya adalah dampak terhadap perencanaan dan jenjang karier seorang Pejabat Fungsional. Peluang karier seorang Pejabat Fungsional keahlian diisi dengan pergerakan dari jenjang Pertama menjadi jenjang Muda sampai jenjang terakhir yaitu Utama yang semakin terspesialisasi pengetahuan, kompetensi maupun keilmuannya, begitu pula dengan jenjang karier Jabatan Fungsional keterampilan yang

jenjang kariernya adalah dari jenjang Pemula sampai jenjang Penyelia yang terakhir. Seharusnya itu disadari sejak awal oleh prajurit yang diangkat dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan pembentukan Jabatan Fungsional, yaitu menghasilkan prajurit yang memiliki spesialisasi dan kepakaran sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya dalam suatu bidang atau fungsi tertentu.

Selain manajemen karier Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, harus diperhatikan juga terkait dengan kaderisasi Jabatan. Bagaimana Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dapat menjamin kelangsungan kaderisasi Jabatan Fungsional sangat menentukan keberlangsungan hidup Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, sehingga organisasi selalu memiliki prajurit yang memiliki kepakaran dan terspesialisasi saat dibutuhkan. Telah dibahas sebelumnya bahwa organisasi dewasa ini telah berkembang menjadi organisasi yang berbasis pada informasi. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak mungkin seluruh informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dikuasai oleh satu orang atau segelintir orang dalam organisasi. Hal ini tentunya berbeda dengan organisasi zaman dulu yang memusatkan informasi hanya pada pimpinan tertinggi organisasi saja. Organisasi berbasis informasi sangat tergantung pada keberadaan *knowledge worker*. Dalam Instansi Pemerintah, peran Pejabat Fungsional dengan kepakaran dan spesialisasi pengetahuan, kompetensi dan keilmuannya sangat menentukan terhadap informasi dan kualitas informasi yang beredar dalam organisasi. Apabila

Instansi Pemerintah yang biasanya terdiri dari berbagai macam fungsi tidak memiliki kader Pejabat Fungsional yang kompeten, dapat dipastikan informasi yang sampai pada Pejabat pengambil kebijakan dalam organisasi adalah informasi yang tidak kompeten. Apabila informasi yang tidak kompeten menjadi dasar suatu kebijakan organisasi, bisa dibayangkan kualitas dari kebijakan tersebut dan dampaknya bagi organisasi di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kaderisasi Pejabat Fungsional adalah penting untuk dilakukan, sama pentingnya dengan kaderisasi Pejabat Struktural bagi organisasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan terkait dengan kaderisasi Pejabat Fungsional adalah dengan melakukan manajemen talenta pada pengelolaan Jabatan Fungsional. Dalam melakukan manajemen talenta, hal penting dan krusial untuk dilakukan karena sangat menentukan keberhasilan manajemen talenta adalah bagaimana melakukan identifikasi personel TNI yang akan dimasukkan dalam kelompok *talent*, atau kelompok calon suksesi. Identifikasi *talent* harus dilakukan secara hati-hati, cermat dan tepat karena kelompok *talent* ini nantinya yang akan menggantikan Pejabat pada jenjang yang lebih tinggi apabila ada Pejabat yang mendapatkan promosi atau telah purna bakti. Hal penting lainnya yang harus dilakukan dalam manajemen talenta adalah melakukan pengembangan personel TNI, khususnya personel TNI yang telah ditetapkan dalam kelompok *talent* agar pengetahuan, kompetensi dan keilmuan personel TNI tersebut terjaga dan meningkat.

Penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta saat ini dilakukan melalui angka kredit jabatan yang diturunkan dari butir-butir pekerjaan dalam Jabatan Fungsional Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Kabarnya ketentuan tersebut akan diganti melalui penilaian kinerja yang berfokus pada output hasil kerja dari Pejabat Fungsional. Hasil penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional adalah salah satu dasar dalam mengangkat seorang personel TNI dalam Jabatan Fungsional atau naik jenjang Jabatan bagi seorang Pejabat Fungsional. Terlepas dari kelebihan atau kekurangan dari masing-masing sistem tersebut, jangan sampai pengelolaan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional terjebak hanya dalam urusan administrasi sehingga energi dan waktu untuk mengelola manajemen kepersonel TNI dan Jabatan Fungsional habis hanya untuk mengurus administrasi. Perkembangan teknologi informasi seharusnya dapat digunakan untuk mendukung manajemen Jabatan Fungsional agar pekerjaan manajemen keprajuritan tidak lagi terjebak pada administrasi dan dapat lebih berkontribusi dalam urusan strategis organisasi.

C. Pembahasan

Dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta yang menganggap prajurit sebagai aset utama sekaligus faktor utama dalam keberhasilan Dittopad, kegiatan pengembangan kompetensi prajurit adalah tulang punggung yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan aset prajurit.

Mengingat pengembangan kompetensi personel TNI adalah kegiatan penting untuk menghasilkan prajurit yang profesional dan kompeten, maka sudah seharusnya Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta memperhatikan sarana, prasarana dan infrastruktur organisasi untuk mendukung pengembangan kompetensi personel TNI tersebut.

Bagi seorang Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, mengembangkan kompetensi dalam bidang Topografi khususnya kelurahan geodesi dan geografi melalui pembelajaran berkelanjutan. Apabila terdapat Pejabat Fungsional yang tidak bersedia untuk mengembangkan kompetensinya, maka perlu dipertanyakan perencanaan, seleksi, dan pengangkatan personel TNI dalam Jabatan yang dilakukan oleh Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Tugas organisasi adalah memastikan dan memfasilitasi Pejabat Fungsionalnya untuk dapat belajar sepanjang kariernya dalam organisasi. Selain itu, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta juga harus dapat memastikan bahwa hanya orang yang ahli/terampil dengan pengetahuan, kompetensi dan keilmuan yang terspesialisasi yang dapat meraih jabatan puncak pada jalur karier Fungsional dalam bidang Topografi khususnya jabatan fungsional di survei data dan olah data.

Meskipun pengembangan kompetensi prajurit di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta adalah kegiatan penting dalam manajemen keprajuritan, tetapi belum Jabatan Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta mengikuti diklat bagi Pejabat Fungsional, biasanya mengikuti pendidikan struktural seperti Diklapa, Sesko, dan lainnya. Unit penyelenggara diklat memiliki

peran penting dalam pengembangan kompetensi prajurit, sekaligus sebagai *quality control* terhadap kompetensi Pejabat Fungsional. Unit penyelenggara diklat harus dapat memastikan bahwa Pejabat Fungsional yang telah lulus diklat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional dan diklat penjenjangan telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Konsistensi lembaga penyelenggara diklat untuk menghasilkan Pejabat Fungsional yang kompeten sangat diperlukan untuk membantu Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugas, pekerjaan dan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa organisasi hanya mendapatkan personel TNI yang kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional.

Unit penyelenggara diklat bersama unit penelitian dan pengembangan harus dapat berperan dalam *up date* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta yang menjadi binaannya. Sebagai seorang *knowledge worker*, Pejabat Fungsional harus *up to date* terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama terkait dengan pengetahuan dan keilmuan yang menjadi kepakaran dan spesialisasinya yaitu Topografi. Hal tersebut akan sangat terbantu apabila unit penyelenggara diklat dapat berperan optimal dalam mendukung pengembangan kompetensi personel TNI. Selain untuk melatih dan mendidik Pejabat Fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, unit penyelenggara diklat juga diperlukan untuk melatih Tim Penilai Prestasi Kerja Jabatan Fungsional yang saat ini masih dilakukan berdasarkan angka kredit. Pelatihan bertujuan agar Tim Penilai memiliki persepsi yang sama dalam memahami tools penilaian dan

dalam melakukan penilaian, memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melakukan penilaian sehingga hasil penilaian lebih obyektif dan menghasilkan Pejabat Fungsional yang kompeten dan pantas untuk duduk dalam Jabatan Fungsional.

Pengembangan kompetensi dan karier personel TNI seringkali hanya dianggap menjadi tugas dan pekerjaan unit yang bertanggung jawab dalam mengelola prajurit di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta. Urusan terkait dengan prajurit, mulai dari yang sangat administratif seperti mangkir, sakit dan pelanggaran disiplin sampai yang sangat strategis seperti menyiapkan pengembangan kader pimpinan organisasi dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab pejabat dan prajurit dalam unit pengelola keprajuritan. Disadari atau tidak, hal tersebut adalah kesalahan manajemen keprajuritan yang dapat mengancam kelangsungan kinerja organisasi, serta mengancam kaderisasi pemimpin dalam organisasi.

Selain peran sebagai seorang Komandan, setiap pimpinan dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta harus dapat berperan sebagai seorang model dan teladan bagi prajurit lainnya. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa salah satu hal yang harus dilakukan dalam penguatan manajemen, peran dan kompetensi Jabatan Fungsional adalah bagaimana organisasi dapat membangun sistem dan tata laksana yang mengharuskan Pejabat Fungsional untuk berperan lebih banyak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan kata lain, bagaimana budaya kerja yang dibangun dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta mampu mendorong

Pejabat Fungsional untuk berperan lebih banyak bagi Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta. Tidak hanya budaya kerja yang tertulis rapi dalam dokumen atau poster, tetapi jauh lebih penting adalah budaya kerja yang benar-benar terbentuk dalam praktek pekerjaan sehari-hari di bidang Topografi. Dalam hal ini, para pimpinan dalam organisasi harus menyadari bahwa mereka adalah model dan lambang budaya kerja dalam organisasi. Personel TNI akan berperilaku seperti yang telah dilakukan oleh pimpinan, bukan apa yang telah dikatakan oleh pimpinannya. Kegagalan dalam membangun budaya organisasi terkadang disebabkan oleh perilaku pimpinan yang tidak konsisten dalam menerapkan sistem, tata laksana dan budaya organisasi yang telah disepakati dalam organisasi.

Disadari atau tidak, perkembangan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta untuk masa yang akan datang sangat tergantung dari kinerja para Prajuritnya, termasuk kinerja para Pejabat Fungsional yang masuk dalam kategori *knowledge worker*. Setiap pimpinan dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta seharusnya sadar terhadap hal tersebut dan harus bersedia meluangkan waktu untuk pengembangan Pejabat Fungsionalnya, bertemu, berdiskusi, membimbing dan mendengarkan. Selain agar saling mengenal antara pimpinan dengan personel TNI nya, kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan antara pimpinan dengan prajuritnya, serta memberi tantangan dan motivasi kepada bawahannya, terutama personel TNI yang masuk dalam kategori talent.

Berdasarkan uraian tersebut, maka komitmen pimpinan dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta sangat dibutuhkan dalam melakukan penguatan manajemen, peran dan kompetensi Jabatan Fungsional topografi. Tidak hanya komitmen dalam bentuk kata-kata, tetapi juga komitmen dalam perilaku nyata dalam pekerjaan. Komitmen untuk membuat suatu kebijakan yang akan berdampak terhadap penguatan dan peningkatan peran serta kompetensi prajurit dalam bidang Topografi. Kenyataannya, terdapat kebijakan yang hanya menjadi kewenangan seorang pimpinan dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta, seperti melakukan restrukturisasi organisasi atau menetapkan sistem, tata laksana dan tata hubungan kerja prajurit dalam Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta. Tanpa komitmen dari pimpinan, hampir dapat dipastikan program penguatan manajemen, peran dan kompetensi Pejabat Fungsional dalam mendukung Reformasi Birokrasi tidak akan pernah terjadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dalam pembahasan, jabatan fungsional di Direktorat Topografi Angkatan Darat lebih banyak dilakukan oleh personel yang bertugas di bagian Subditbinsurdattop yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan survey data dan bagian Subditbinlahdatatop yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan olah data dan pembuatan laporan wilayah. Kompetensi jabatan fungsional di subdit survei data dan subdit olah data merupakan hal yang penting bagi Direktorat Topografi Angkatan Darat, namun kenyataannya posisi jabatan ini dipegang oleh personel dengan pendidikan struktural yang dididik di Sekolah Sesko, Diklapa dan kecabangan lain dan belum mendapat pendidikan keahlian khusus seperti geodesi dan geografi, padahal kedepan diharapkan personel TNI ini dapat menjadi perwira analis ahli pemetaan dan perwira analis ahli geografi.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jabatan fungsional di Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat adalah alternatif yang pertama memberikan bekal tambahan pendidikan dengan sekolah di perguruan tinggi untuk bidang geodesi dan geografi, kemudian alternatif kedua menambah jumlah prajurit pada Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta dan alternatif yang ketiga dapat dipertimbangkan, yaitu merubah cara kerja melalui inovasi agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien.

B. Saran

1. Sebaiknya personel TNI diberikan bekal tambahan pendidikan dengan sekolah di perguruan tinggi untuk bidang geodesi dan geografi, sehingga harapannya kompetensi dapat meningkat dan kedepannya diharapkan personel TNI ini dapat menjadi perwira analis ahli pemetaan dan perwira analis ahli geografi.
2. Menambah jumlah prajurit pada Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Jakarta walaupun ini tidak mudah karena harus mendapat persetujuan dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, dan berpotensi untuk menambah beban anggaran Negara dengan cukup besar
3. Sebaiknya melakukan perubahan cara kerja melalui inovasi agar pelaksanaan pekerjaan dalam bidang Topografi dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan, 2010, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosia lainnya*, Jakarta: Kencana Prenama Media Group
- Cahyo, Rahmad, 2011, *Sekilas Tentang Topografi Angkatan Darat*, www.rahmadcahyo.blogspot.com, tanggal akses 6 Januari 2018
- Flippo, Edwin B, 2011, *Manajemen Personalia*, Jakarta: PT. Gelora Askara Pratma
- Gozali Rahman, 2015, *Studi Tentang Analisis Jabatan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur*
- Harsono, 2010, *Perencanaan Kepegawaian*, Bandung: Fokusmedia
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang *Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang *Jabatan Fungsional PNS*
- Perdhana Ari Sudewo, 2014, *Penguatan Jabatan Fungsional Untuk Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan*
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : SE/02/II/1994 tanggal 14 Pebruari 1994 tentang *Wewenang Dan Tanggung Jawab Pembuatan, Reproduksi Dan Pembekalan Peta Topografi Wilayah Nasional Indonesia*

Surat Telegram Kasad Nomor : ST/232/1994 tanggal 2 April 1994

Utrecht, E., 1994, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*

Wayne, Mondy R 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Erlangga

Wursanto, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: Andi Offset

www.kodam17cenderawasih.mil.id, tanggal akses 6 Januari 2018

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat